

ABSTRAK

Asmara Bakti, 8156132058 Analisis Kebijakan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Aceh Selatan. Tesis. Medan: Program Pascasarjana UNIMED, Nopemb 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis kebijakan pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C Edwards III dengan cara melihat bagaimana proses komunikasi, kesiapan sumberdaya, proses disposisi dan faktor struktur birokrasi serta implementasi Kepmendiknas nomor 60 tahun 2002 dalam analisis implementasi kebijakan pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi dengan informan para pengambil kebijakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 24 sekolah yang dibangun dan dinegerikan pada tahun 2014 dan tahun 2016 terdapat 12 sekolah jumlah siswa tidak sesuai dengan syarat rombongan belajar yang ditetapkan, sarana dan prasarana sekolah belum lengkap dan penempatan pendidik serta tenaga kependidikan belum merata. Proses komunikasi, sosialisasi tentang syarat pendirian sekolah tidak dilaksanakan dengan baik. Kesiapan sumberdaya seperti penyampaian informasi tentang syarat pendirian sekolah belum maksimal, fasilitas sarana dan prasarana sekolah belum lengkap dan memadai. Proses disposisi belum tepat karena dinas pendidikan tidak menerbitkan surat keputusan dan insentif untuk tim verifikasi studi kelayakan. Faktor struktur birokrasi belum jelas karena belum ada pembagian tugas yang jelas dalam tim verifikasi pendirian sekolah, standar operasional prosedur belum mengacu pada Kepmendikbud Nomor 060/U/2002. Kesimpulan penelitian bahwa Dinas Pendidikan Aceh Selatan belum optimal melaksanakan implementasi kebijakan sesuai dengan Kepmendiknas Nomor 060/U/2002. Saran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan agar melengkapi sarana dan prasarana yang belum ada serta pemerataan guru pada sekolah SD dan SMP yang didirikan pada tahun 2014 dan tahun 2016. Saran untuk Dinas Pendidikan Provinsi Aceh agar memperhatikan dan melengkapi fasilitas sekolah menengah yang di bangun tahun 2014 di Kabupaten Aceh Selatan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pendirian Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan Aceh Selatan

ABSTRACT

Asmara Bakti, 8156132058 Policy Analysis of Establishment of Primary and Secondary Education Units in Kabupaten Aceh Selatan. Thesis. Medan: UNIMED Graduate Program, Nopember 2017.

This study aims to determine the results of policy analysis of the establishment of elementary and secondary education units in the District of South Aceh by using the theory of policy implementation George C Edwards III by looking at how communication process, resource readiness, disposition process and bureaucratic structure factors and implementation Kepmendiknas number 60 year 2002 in the analysis of policy implementation of the establishment of elementary and secondary education units in the District of South Aceh. This research uses descriptive research methodology with data collection technique is done by interview, observation and documentation study with informants of decision maker in Education and Culture Office of South Aceh Regency. The results showed that from 24 schools built and dikegerikan in 2014 and 2016 there are 12 schools the number of students is not in accordance with the requirements of the study group is set, facilities and infrastructure is not yet complete and equality of educators and educational staff has not been evenly distributed. The process of communication, socialization of the requirement of the establishment of schools is not implemented properly. The readiness of resources such as the delivery of information about the requirement of the establishment of schools has not been maximal, the facilities of school facilities and infrastructure have not been complete and adequate. The disposition process is not yet appropriate because the education office does not issue a decree and incentives for the feasibility study verification team. The bureaucratic structure factor is not clear yet because there is no clear division of tasks in the verification team of the establishment of educational unit, the operational standard of the procedure has not been referring to Kepmendikbud Number 060 / U / 2002. The conclusion of the study that the Department of Education of South Aceh has not been optimal in implementing the its policy. Recommendations to the Education Office of South Aceh Regency are expected to immediately complete the facilities of incomplete facilities and infrastructure as well as the distribution of teachers in primary and junior high schools established in 2014 and 2016. Recommendations for the Aceh Provincial Education Office immediately fix and equip facilities such as laboratories and equipment in high school that was built in 2014 so that quality education services to the community can be achieved.

Keywords: Policy Implementation, Establishment of Education Unit, South Aceh Education Office